



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers : 42/HumasPMK/III/2017

Menko PMK Hadiri Seminar Kerjasama Rantau ASEAN tentang Kekerasan terhadap Anak

Kuala Lumpur (14/03)--- Memenuhi undangan Istri PM Malaysia Najib Tun Razak, Rosmah Mansor, untuk menjadi Pembicara pada seminar Kerjasama Rantau ASEAN dalam Memberantas Jenayah Seksual Kanak-kanak, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, hari ini hadir di tengah forum seminar itu. Bertempat di gedung Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) Kuala Lumpur, Megawati hadir didampingi oleh Menko PMK, Puan Maharani, dan membawakan materi yang sepenuhnya menekankan pada manfaat pendidikan keluarga sebagai peletak dasar pendidikan budi pekerti. Menghadiri seminar ini merupakan agenda hari kedua Menko PMK di Kuala Lumpur setelah kemarin berkunjung ke SIKL dan pusat penampungan TKI ilegal.

“Negara Indonesia adalah negara merdeka yang telah memberikan kehidupan berdasarkan prinsip kesetaraan yang adil bagi rakyatnya. Kaum perempuan dan anakpbagian tersendiri dalam peradaban Indonesia sebagai bangsa yang adil dan makmur,” papar Megawati memulai uraiannya.

Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tambahna, dibangun rasa saling menyayangi dan menghormati. Tidak ada saling meniadakan ataupun mendominasi. Namun, tidak dipungkiri pula kalau masih banyak terjadi aksi kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun psikologis, baik di ranah pribadi maupun ranah publik. “Bagi saya, perlindungan terhadap perempuan adalah perlindungan terhadap anak-anak. Demikian pula dengan perlindungan terhadap anak adalah perlindungan terhadap perempuan,” kata Megawati lagi.

Maka, semasa Pemerintahannya di tahun 2000 lalu, untuk upaya perlindungan perempuan dan anak, Megawati melahirkan sejumlah produk regulasi, antara lain meratifikasi Konvensi ILO 182/1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang kemudian menjadi Undang-undmag negara. Dua tahun kemudian, disahkannya Undang-undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Megawati juga menandatangani Keputusan Presiden, yaitu: Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Selanjutnya, di penghujung jabatan saya sebagai Presiden, saya mensahkan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi, menurut Megawati karena faktor kemiskinan dan pandangan nilai budaya yang mempersempit kiprah kaum perempuan. “Maka, pandangan dan nilai tradisi itu yang harus kita ubah melalui skenario kebudayaan untuk menjadikan warga negara setara dan tidak membedakan agama, suku, ras, dan status sosialnya.” Demikian Megawati menutup pidatonya.

*Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk*